



Masuk tanggal : 28-Agustus-2025, revisi tanggal: 10-10-2025, diterima untuk diterbitkan tanggal : 11-Oktober-2025

An Evaluation of the Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) and Its Effect on the Effectiveness of Budget Realization Reporting in Puntang Village

Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Desa Puntang

Keri Boru Hotang¹, Iis Klara²

^{1,2} Prodi Akuntansi, STIE Tri Bhakti, Jln Jl. Teuku Umar, Cut Mutia No.24, Kota Bekasi

Email: keriboruhotang@gmail.com, iisklaraklara37697@gmail.com

Abstract

The Village Financial System (SISKEUDES) is a digital application developed by the Ministry of Home Affairs in collaboration with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This system was introduced to improve efficiency, transparency, and accountability in managing village finances. The release of SISKEUDES version 2.0 represents a digital innovation designed to assist village officials in the preparation and reporting of budget realization, particularly in Puntang Village, Palembang City. However, its implementation still presents several challenges for the village apparatus. This study aims to explore and describe the evaluation implementation of the SISKEUDES application in Puntang Village, Palembang City, and to identify the obstacles that hinder its effectiveness. The research adopts a qualitative case study approach, employing in-depth interviews with key informants, including the Village Head, the Head of Village Planning, and the Head of Village Finance. Data analysis is guided by Charles O. Jones' Policy Implementation Theory, which encompasses stages of organization, interpretation, and application. The findings reveal two major issues: (1) insufficient readiness and capacity of human resources within the village government, particularly regarding technical skills and understanding of the system; and (2) recurring technical barriers, such as unstable internet access and limited technical support. These issues indicate that the implementation of SISKEUDES in Puntang Village has not yet reached an effective or optimal level. This research is expected to serve as an evaluative reference for improving digital-based financial management in villages. It highlights the need for ongoing training, improved infrastructure, and strengthened monitoring and evaluation mechanisms in future implementations.

Keywords: Service Innovation, Village Financial System, Budget Realization Report

Abstrak

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Peluncuran SISKEUDES versi 2.0 menjadi salah satu langkah inovatif dalam mendukung tata kelola keuangan desa berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam evaluasi implementasi penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Puntang, Kota Palembang, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa, Kepala Bidang Perencanaan Desa, dan Kepala Bidang Keuangan Desa. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang mencakup tahapan organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SISKEUDES di Desa Puntang masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain: (1) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi teknis maupun pemahaman terhadap sistem; dan (2) kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi, seperti akses internet yang tidak stabil dan kurangnya dukungan teknis yang memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Puntang belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pelaporan realisasi anggaran desa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur pendukung, serta penguatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem keuangan desa berbasis digital.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan, Siskeudes, Laporan Realisasi Anggaran

Pendahuluan

Pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi suatu bentuk dari kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Namun kenyataannya, banyak ditemukan keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan realisasi anggaran desa, yang mengakibatkan pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini berisiko menurunkan efisiensi, efektivitas, serta berdampak terhadap aspek ekonomi masyarakat di desa tersebut. Permasalahan ini terjadi di salah satu desa yaitu Desa Puntang, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang di mana masyarakat mengkritik pelaksanaan pembagian BLT-DD dan pembangunan fisik karena dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan warga secara maksimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Sebagaimana diberitakan oleh media lokal, masyarakat menyayangkan penempatan titik nol pembangunan yang tidak melalui musyawarah terbuka, serta minimnya sosialisasi terkait penggunaan dana desa (Tipikor Investigasi News, 2024). Selain itu, secara umum, alokasi dana desa di Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 mencapai Rp124 miliar yang dibagikan ke seluruh desa, termasuk Desa Puntang yang menerima sekitar Rp918 juta. Namun, besarnya dana tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan optimalisasi pemanfaatannya, karena banyak masyarakat yang mempertanyakan dampak langsung dari program-program desa terhadap kesejahteraan warga (RBTv Disway, 2024)

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang - undang Nomor 6 Tahun Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Bentuk kerjasama yang dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap. Sebelum SISKEUDES diterapkan (sebelum tahun 2015-2016), sebagian besar desa di Indonesia (termasuk Sumatera Selatan) masih menggunakan sistem manual berbasis Microsoft Excel dan pembukuan kertas, hal tersebut menyebabkan tingkat keterlambatan pelaporan tinggi serta kurangnya transparansi ke masyarakat kurang karena dokumen tidak tersip dengan baik (BPKP RI, Laporan Evaluasi SISKEUDES 2017). Dan pada saat ini kantor Kepala Desa Puntang Sumatera Selatan telah menyusun laporan realisasi anggaran menggunakan aplikasi yang telah diberikan oleh pemerintah yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pelaksanaan dari kegiatan pemerintahan sebagai suatu sarana dalam menyajikan suatu informasi dalam bentuk pertanggungjawaban. Siskeudes inilah yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik, meminimalisir kesalahan dalam penatausahaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes, realisasi anggaran desa merupakan semua bentuk penganggaran dalam pemerintahan desa guna pembangunan desa yang lebih baik.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES dimana implementasinya belum sepenuhnya optimal. Salah satu penelitian oleh Pujiani & Astuti pada tahun 2022 berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)" Di Desa Jerowaru, penerapan SISKEUDES terbukti sangat berhasil dan efisien. Semua tahapan telah dijalankan dengan sempurna di desa ini, menghasilkan angka-angka keuangan yang dapat dipercaya. Sayangnya, penerapan SISKEUDES di Kantor Desa Jerowaru memiliki beberapa kendala, antara lain gangguan jaringan internet, gangguan sistem, dan kendala input data, terutama pada tahap administrasi Mengacu latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk inovasi pelayanan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam peningkatan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam di salah satu desa di Provinsi Sumatera Selatan tentang Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Desa Puntang Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan atas keuangan daerah (Ratmono & Sholihin, 2017). Proses pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah yang terdapat dalam suatu instansi harus dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan

pengelolaan keuangan yang baik mencakup 4 karakteristik pengelolaan keuangan yaitu, 1) Efektif, 2) Efisien, 3) Transparansi dan 4) Akuntabilitas (Halim, 2013:29).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang akurat di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan public terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi. Pengawasan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP sendiri bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai dengan perannya masing masing. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawasan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village Governance (Pratiwi&Pravasanti, 2020).

Inovasi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan terkadang menemui hambatan maupun tantangan pada implementasinya, agar instansi pemerintah dapat terus berkembang dan bersaing menghadapi tantangan yang ada, diperlukan inovasi dalam melayani masyarakat Inovasi dalam sektor publik dianggap sebagai langkah untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Semakin inovatif suatu sistem pemerintahan, maka semakin besar pula nilai tambah atau manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Inovasi yang sesuai untuk sektor publik mencakup perubahan kebijakan atau praktik manajerial yang membawa perbaikan terkini dalam hal tingkat layanan, serta kuantitas atau kualitas output suatu organisasi. keberhasilan inovasi ditandai dengan penerapan proses, produk, layanan, atau metode baru yang mampu memberikan peningkatan signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, maupun mutu layanan yang diberikan (Kristanto, 2018).

Charles O. Jones dalam bukunya Public Policy: An Introduction (1977) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang menyangkut bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata atau program. implementasi mencakup 3 (tiga) aktivitas utama:

1. *Organizing* (Pengorganisasian); bagaimana struktur dan sumber daya diatur untuk melaksanakan kebijakan, termasuk Pembagian wewenang dan tanggung jawab, Penetapan prosedur administrative, Penyediaan sumber daya (SDM, keuangan, teknologi)
2. *Interpreting* (Penafsiran); proses menerjemahkan isi kebijakan ke dalam pedoman teknis dan operasional yang dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan
3. *Applying* (Penerapan); Pelaporan dan monitoring
Sebagai contoh Penggunaan SISKEUDEDES oleh perangkat desa dalam menyusun APBDes, menginput transaksi keuangan, dan membuat laporan realisasi anggaran.

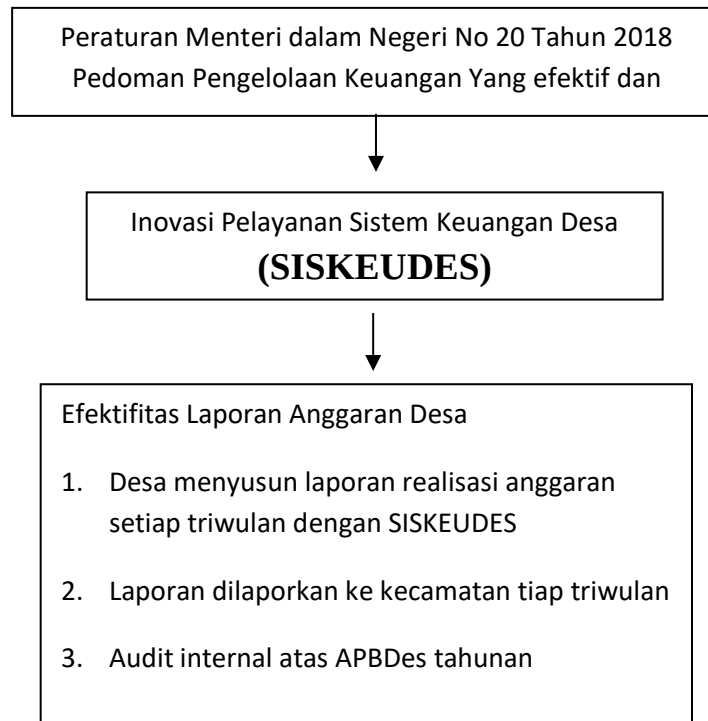
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah aparat desa dalam mengelola proses administrasi keuangan, mulai dari penatausahaan, penyusunan anggaran, hingga pelaporan. Penggunaan aplikasi ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah. Selain itu, Siskeudes mampu menghasilkan berbagai laporan yang dibutuhkan secara cepat dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, meminimalkan risiko kesalahan maupun penyelewengan, serta memudahkan integrasi data keuangan desa secara sistematis. (Rivan, Arif & Maksum, 2019). Aplikasi siskeudes yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur dalam aplikasi siskeudes dibuat sangat sederhana dan user *friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes. Proses pengelolaan keuangan desa meliputi: a. Perencanaan, b. Penganggaran, c. Pelaksanaan, d. Penatausahaan, e. Pelaporan dan Pertanggung jawaban, f. Pengawasan.

Kelebihan terpenting dari aplikasi ini yaitu sangat mudah dimengerti oleh pemerintah desa dikarenakan fitur dalam aplikasi ini sangat sederhana untuk dipahami (Hidayat et al., 2019). Hal ini juga didukung dari pernyataan Yuliawati & Sari (2021) menunjukkan bahwa di beberapa desa di Sumatera Selatan, penggunaan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap efektifitas pengelolaan APBDes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini juga dilengkapi dengan sistem pengelolaan intern, tidak sulit dalam penggunaannya, dapat bergabung dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya, serta aplikasi ini juga dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Pada laporan realisasi anggaran yang ada pada pemerintahan desa disebut dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat Ratmono dan Sholihin (2017). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diparagrah sebelumnya, maka dapat disimpulkan kedalam rangka penelitian sebagai berikut:



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa, serta dampaknya terhadap efektivitas penyusunan laporan realisasi anggaran dan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan situasi atau fenomena yang terjadi secara apa adanya, tanpa adanya manipulasi variabel. Penelitian kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta proses yang terjadi dalam implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Puntang, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang.

Selanjutnya Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puntang, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposive karena desa tersebut termasuk salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan komprehensif untuk tujuan penelitian ini. Fokus penelitian meliputi: 1. Proses implementasi aplikasi Siskeudes dalam tahapan pengelolaan dana desa (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban). 2. Dampak penggunaan Siskeudes terhadap efektivitas penyusunan laporan realisasi anggaran. 3. Kegiatan pemerintah desa dalam penerapan aplikasi. 4. Kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan Siskeudes. 5. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Siskeudes menurut pelaksana di desa.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Perangkat

Desa lainnya, Perwakilan masyarakat desa. Selanjutnya Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi Siskeudes, seperti: Laporan realisasi anggaran desa, Dokumen penganggaran, peraturan dan pedoman pelaksanaan dana desa, arsip administrasi desa yang relevan

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi mengenai proses penerapan Siskeudes, persepsi terhadap sistem, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Siskeudes. Observasi ini mencakup proses input data, pencatatan, pelaporan, dan interaksi antarperangkat desa dalam penggunaan sistem.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan antara lain: laporan keuangan desa, bukti pengeluaran, arsip penggunaan Siskeudes, dan dokumen pendukung lainnya.

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, baik sebelum maupun setelah proses pengumpulan data. Selama proses wawancara, peneliti secara simultan melakukan analisis terhadap informasi yang diberikan oleh informan. Apabila data yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan penelitian, peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam. Proses analisis data ini terdiri atas empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Tahap ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang karena peneliti perlu memahami konteks sosial dan objek penelitian secara menyeluruh. Konsekuensinya, data yang dikumpulkan cenderung beragam dan kompleks.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sering kali berjumlah besar dan tidak terstruktur, sehingga memerlukan proses penyaringan dan pencatatan yang sistematis. Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, serta pengorganisasian informasi untuk menyaring hal-hal yang relevan. Tahap ini bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih terarah, memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya, serta mempercepat proses pencarian informasi ketika diperlukan.

3. Penyajian Data

Informasi yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk penyajian yang sistematis, seperti dalam bentuk narasi ringkas, tabel, diagram, atau model visual lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman terhadap pola-pola temuan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara (tentatif) dan akan diuji kembali seiring dengan masuknya data baru. Apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang

konsisten dan valid, maka dapat dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Dalam Upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Puntang mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah aplikasi, hal ini disampaikan oleh sekretaris desa dari desa puntang yaitu Bapak Muliadi, informan dari penelitian ini. “Siskeudes diterapkan pada tahun 2018, sebelumnya dalam membuat laporan realisasi anggaran desa menggunakan pencatatan manual saja tanpa sebuah aplikasi”. Siskeudes versi 2.0 adalah inovasi aplikasi pelayanan digital sesuai dengan himbauan pemerintah dan semenjak menggunakan aplikasi siskeudes, dalam membuat pelaporan realisasi anggaran sangat memudahkan, mulai dari penginputan, perhitungan dan pembuatan surat pertanggungjawaban desa serta pelaporannya.

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan observasi, penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau informan, peneliti menemukan berbagai data dengan hasil penelitian, sebagai berikut :

Inovasi Pelayanan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Didapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Puntang dengan memberikan inovasi pelayanan, yaitu dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes, selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penginputan yaitu:

Tahap perencanaan; Proses perencanaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sistematis. Inovasi dari aplikasi ini mempermudah input data mulai dari Renstra Desa serta RKPDDes. Pagu indikatif setiap kegiatan yang dilaksanakan pada desa puntang tertuang dalam RKPDDes. Laporan perencanaan ini dapat dihasilkan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik sesuai format yang telah ditetapkan oleh regulasi, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahap penganggaran; menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan APBDDes. Dalam perencanaan penganggaran APBDDes, terlebih dahulu diadakan musyawarah dalam pengusulan untuk pelaksanaan Pembangunan yang ada dalam desa dengan mengundang beberapa tokoh dari apratur desa Bersama dengan tokoh Masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan perangkat desa untuk menyusun APBDDes secara otomatis berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Sistem mengintegrasikan seluruh komponen anggaran dan menghitung alokasi dana secara presisi, yang mempercepat proses kerja dan mengurangi potensi kekeliruan. Akuntabilitas meningkat karena sistem mencatat seluruh perubahan dan aktivitas secara digital, sehingga dapat diaudit oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat Kabupaten atau BPKP.

Tahap pembukuan; yaitu laporan pembukuan yang berisikan laporan anggaran desa yang berasal dari APBDDes. Efektivitas Siskeudes dalam tahap penatausahaan juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Setiap pengeluaran dan pemasukan kas desa tercatat secara otomatis dan diklasifikasikan dalam buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, buku bank, serta register. Hal ini memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa karena memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Aplikasi Siskeudes terbukti sangat membantu dalam menyusun berbagai jenis laporan keuangan desa, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan. Proses pelaporan menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Muliadi. Y, selaku sekretaris desa puntang, maka dapat memberikan informasi tentang laporan realisasi anggaran dalam bentuk LPJ serta rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) sebagai laporan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas penganggaran desa setiap tahunnya. Sistem juga menyediakan format laporan otomatis yang dapat langsung dicetak dan diajukan ke kecamatan, kabupaten, atau pihak pengawas lainnya.

Prosedur pengisian Siskeudes terbilang masih banyak pos-pos yang perlu di isi terlebih dahulu, dari penjelasan Ibu Karlina selaku kepala urusan keuangan desa puntang, dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi siskeudes ada beberapa pos-pos yang perlu dirampingkan agar lebih mempersingkat dalam penginputan, selain itu hambatan pada aspek transparansi masih menjadi persoalan krusial. Masyarakat desa umumnya tidak mengetahui secara langsung hasil pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecuali saat Musdes (Musyawarah Desa) yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan masih bersifat pasif dan tidak didorong secara sistematis oleh pemerintah desa.

Peningkatan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran

Dari aspek efektivitas, penerapan aplikasi ini terbukti menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Proses pelaporan yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit, dengan pengurangan signifikan dalam biaya operasional dan penggunaan alat tulis kantor. Berdasarkan wawancara, sekretaris desa sebagai pengguna utama aplikasi mengungkapkan bahwa sistem ini sangat membantu dalam penyederhanaan proses administrasi keuangan. Sebelum penerapan aplikasi, bendahara harus melakukan perjalanan selama kurang lebih 30 menit ke kantor kabupaten untuk mengurus dokumen keuangan. Kini, dengan adanya Siskeudes, proses tersebut dapat dilakukan langsung dari desa, menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi beban kerja perangkat desa.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Puntang, inovasi pelayanan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang telah berjalan. Dari aspek efektivitas, penerapan aplikasi ini terbukti menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Proses pelaporan yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit, dengan pengurangan signifikan dalam biaya operasional dan penggunaan alat tulis kantor. Tetapi belum efektif dalam aplikasi siskeudes, karena ada beberapa pos-pos yang perlu dirampingkan agar lebih mempersingkat dalam penginputan terutama dalam transparansi laporan realisasi anggaran desa. Namun untuk meningkatkan efektivitas ke depan, direkomendasikan pengembangan sistem transparansi digital yang terbuka dan penguatan, misalnya melalui pemanfaatan situs resmi desa untuk penyampaian informasi kepada seluruh Masyarakat desa. Selanjutnya diharapkan pemerintah Desa Puntang meningkatkan sumber daya manusia supaya menghasilkan Lembaga kemasyarakatan yang

produktif serta lebih baik lagi melalui pelatihan teknis membaca laporan pertanggung jawaban desa, serta tambahan untuk mengoptimalkan infrastruktur internet.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti memberikan terima kasih dan syukur kepada Tuhan YME, keluarga, teman dosen sejawat, mahasiswa dari STIE Tri Bhakti serta pemerintahan Desa Puntang Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang yang membantu peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2022). Pedoman Umum Pembangunan Desa (2022). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Fadli, G. K., Fitriyah, & Astuti, P. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis EGovernment di Desa (Studi Keberhasilan di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang). *Journal Undip*, 4(1), 1–23.
- Hidayat, A. R., Noor, M., & Erawan, E. (2019). PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) Studi Komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 1–11
- Kristanto, Y. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan E Government (Studi Kasus Pelaksanaan Aplikasi Lapor Hendi). *Journal of Public Administration and Local Governance*, 1–11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. (2018).
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 217223
- Pujiani, E. S., L, B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal RISMA*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). Akuntansi keuangan daerah. UPP STIM YKPN.
- Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>
- <https://www.tipikorinvestigasineews.id/desa-puntang-dikecamatan-sikap-dalam-laksanakan-pembagian-blt-dd-dan-penempatan-titik-nol-bangunan-pisik/>. 3 Juni 2025
- <https://rbtv.disway.id/read/54615/rincian-dana-desa-kabupaten-empat-lawang-2024-ini-desa-yang-paling-kecil-dapat-anggaran>. 9 Oktober 2025
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo. (2020). “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–124
- Yuliawati, E., & Sari, D. (2021). Dampak Penggunaan SISKEUDES terhadap Efektivitas APBDes di Sumatera Selatan. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*. Volume 6. Issue 1. <https://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/2008/1805>

Wahyudi, A. A., Firdausy, B. M., & Sari, N. R. (2022). Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 27–43. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.11527>.